



EISSN : [27164012](#)

ISSN : [23384751](#)

DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah

Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 15118 Banten

KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN DESA WISATA DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT

¹Ratih Kurnia Hidayati

¹LSPR Institute of Communication & Business

Email: Ratih.kh@lspr.edu

Article Information :

Submitted 8 Desember 2023

Revised 5 Januari 2024

Published 10 Januari 2024.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the depiction of community empowerment communication construction through tourism management, namely tourism villages in the Kuningan Regency area of West Java using the literature study method. The concept of community empowerment, the concept of community participation, the concept of tourism management and the concept of tourism village management are used to describe the process of tourism village management in Kuningan Regency through community empowerment communication so as to encourage active role and community participation in tourism village management.

Keywords : Communication of community empowerment, community participation, tourism village management

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana penggambaran konstruksi komunikasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata yakni desa wisata di wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat dengan menggunakan metode studi literatur. Konsep pemberdayaan masyarakat, konsep partisipasi masyarakat, konsep pengelolaan pariwisata dan konsep pengelolaan desa wisata digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan melalui komunikasi pemberdayaan masyarakat sehingga mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Kata Kunci : Komunikasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, pengelolaan desa wisata

PENDAHULUAN

Memahami pembangunan tentunya perlu membahas definisi pembangunan dari berbagai pendapat para ahli. Tentunya pembahasan mengenai pembangunan sudah terjadi perkembangan yang pesat yakni dimulai dari pembangunan yang berawal dari pandangan ilmuwan di bidang sosiologi hingga pembangunan saat ini yakni pembangunan berkelanjutan.

Tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satu alinea berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Pembangunan negara Indonesia merupakan upaya agar Pancasila dapat hidup sejahtera, adil, sejahtera, sejahtera lahir dan batin. (Wardhana & Aditya, 2019)

Dalam mengimplementasikan UUD Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila maka diwujudkan melalui pembangunan, baik pembangunan nasional perkotaan maupun pedesaan sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Mengutip dari (Kartono & Nurcholis, 2016) bahwa pembangunan memiliki makna yakni usaha yang dilakukan demi mewujudkan hidup yang lebih baik. Melihat dari konsep dasar dari kenegaraan Indonesia, Pembangunan bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir berupaya mewujudkan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dasar pokok dari pembangunan sejalan dengan cita-cita yang berkeadilan sosial. Sehingga diperlukan proses dan tahapan yang sesuai dengan harapan dan terukur sehingga cita-cita menjadi nyata. Tentunya tahapan juga harus saling berkaitan dengan beberapa aspek, seperti bidang ekonomi sebagai ukuran dari kemakmuran materi, bidang kesejahteraan sosial dan bidang keadilan sosial. Pada aspek sosial, aspek aspirasi dari masyarakat dan juga lembaga sosial yang terbentuk juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan dan dipelihara untuk selalu sesuai dengan tujuan dan fungsi (Kartono & Nurcholis, 2016).

Mengutip dari (Digdowiseiso, 2019) pembangunan merupakan usaha secara terencana yang dilakukan oleh pemerintah, bangsa hingga negara demi mewujudkan pertumbuhan, perubahan dan modernitas dan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Definisi pembangunan secara umum menurut (Kartono & Nurcholis, 2016) adanya rencana yang disusun oleh pemerintah khususnya badan perencanaan untuk pembangunan untuk menetapkan rencana dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya pembangunan awalnya digunakan untuk bidang ekonomi yakni adanya pembangunan pertumbuhan perekonomian. Hasil pembangunan berupa adanya pertumbuhan perekonomian, adanya produktivitas di tatanan masyarakat hingga negara. Pendapat dari (Jamaludin, 2016) bahwa *development* adalah makna dari pembangunan yang merupakan penerapan upaya dari konsep pembangunan yang sudah ditetapkan dengan tujuan memajukan kondisi masyarakat di suatu negara.

Dari penjelasan pembangunan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan pembangunan ialah suatu proses, implementasi dan hingga evaluasi dari pembangunan yang akan mewujudkan negara dan masyarakat menuju sejahtera dan berkeadilan sosial dan sesuai dengan cita-cita negara tersebut. Setelah memahami definisi dari pembangunan, tentunya terdapat beberapa model pembangunan yang bisa dijalankan oleh suatu pemerintahan.

Penjabaran dari (Kartono & Nurcholis, 2016) terdapat tiga model pembangunan

dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (*economic growth*), model berpusat pada naiknya perekonomian secara nasional dalam jangka waktu tertentu. Proses pembangunan pada model ini terfokus kepada proses produksi melalui akumulasi modal baik investasi SDM, investasi perlatan fisik maupun investasi tanah untuk bangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas pada tenaga kerja, adanya kemajuan teknologi yang dapat membantu pekerjaan yang membutuhkan alat; 2) pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar/kesejahteraan (*Basic needs*), model pembangunan ini dipelopori oleh Gunnar Myrdall menyimpulkan permasalahan kemiskinan di masyarakat dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut perlu difasilitasi atau dibantu oleh Pemerintah berupa subsidi atau membantu memenuhi kebutuhan tersebut; 3) pembangunan yang berpusat pada manusia (*People centered*), pembangunan berorientasi pada peningkatan pengembangan dan kesejahteraan manusia berupa pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah hadir sebagai fasilitator dengan menciptakan manusia berkembang dan aktualisasi diri di lingkungan sosial.

Pembangunan dengan model *people centered* yang memusatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu diperlukan media atau alat yang dapat menyampaikan pesan mengenai pembangunan kepada masyarakat, yakni menggunakan komunikasi. Komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah untuk memberikan pesan mengenai proses, kebijakan dan tahap implementasi pembangunan yang disampaikan ke masyarakat. Model *people centered* pada saat ini bisa diimplementasikan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai bentuk upaya memperdayakan dan membuat masyarakat menjadi berdaya dan juga bisa mandiri. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat supaya mendapatkan taraf perekonomian yang stabil dan juga kualitas hidup yang baik (Nindatu, 2019). Pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata dan lebih khususnya pada pengelolaan desa wisata saat ini menjadi tujuan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah sehingga membawa dampak perekonomian di suatu daerah dan juga masyarakat disekitar mendapatkan kualitas hidup dan perekonomian menjadi meningkat.

Berbicara mengenai kepariwisataan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Perekonomian masyarakat dan pendaatan devisa dapat didukung dari adanya kegiatan kepariwisataan. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan harapan mengembangkan perekonomian, adanya pengembaran suatu daerah atau desa, adanya penggunaan sumber daya baik alam maupun manusia sesuai kebutuhan, mendapatkan pendapatan dari industri pariwisata (Hakim, 2010).

Pada tahun 2019, pariwisata Indonesia menghasilkan 260 triliun untuk pendapatan nasional, mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara dan juga sebanyak 12,6 juta orang mendapatkan kesempatan peluang kerja. Selain itu, melalui pariwisata, Indonesia berhasil meraih 30 besar pada indeks daya saing di tingkat Internasional (Khusniyah, 2020). Oleh karena itu, tentunya pemerintah terus berupaya di tahun tahun selanjutnya mencanangkan program pembangunan yang lebih baik pada sektor pariwisata. Program pembangunan pariwisata tentunya membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat sehingga dapat mewujudkan adanya pemberdayaan masyarakat baik di tingkat desa hingga provinsi. Adanya hasil yang kurang optimal dan pertumbuhan perekonomian yang lambat dari pariwisata berasal dari kurang

koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait.

Pembinaan, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian yang difasilitasi untuk membentuk desa yang berdaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa supaya menghasilkan pengelolaan desa yang tepat sasaran. Adapun pengertian desa wisata merupakan bentuk implementasi yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan tujuan menghasilkan desa yang berdaya. Masyarakat dapat berperan, dan menentukan sikap berupa siap, peduli dan terlibat aktif dalam pengelolaan dan pembentukan desa menjadi desa wisata. Selain itu, masyarakat tentunya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan elemen-elemen lain berupa pemangku kepentingan demi mewujudkan pengelolaan dan perkembangan desa wisata menjadi meningkat dan berkualitas (www.digitaldesa.id, 2020).

Dari sektor kepariwisataan yang mampu membantu pengembangan daerah, hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan Andalan (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) atau bisa disingkat sebagai Ciayumajakuning. Sektor unggulan Kabupaten Kuningan yakni sektor pariwisata yang menjadi penyangga pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten itu sendiri. Pada sektor pariwisata dan dilihat pada kondisi geografis yang ada, disuguhkan dengan keindahan pegunungan, keindahan alam, sumber mata air alami gunung Ciremai dan wisata sejarah. Jika dilihat pada (www.kuningankab.go.id/, 2021) terdapat 21 obyek wisata alam, 6 obyek wisata budaya, dan 11 obyek wisata minat khusus. Pada jumlah kunjungan wisata kabupaten kuningan pada tahun 2018, total jumlah pengunjung mencapai 4.002.124 baik wisatawan domestik dan mancanegara.



Gambar 1. Logo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Komunikasi pemberdayaan masyarakat di desa wisata yang dilakukan oleh Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh yang diimplementasikan di Kuningan Jawa Barat. Kabupaten Kuningan hingga 2021 ini sudah memiliki 6 desa wisata yang sudah maju yakni deswis Cibuntu, deswis Kampung Tumaritis, deswis Beunghar, deswis Cisantana, deswis Manis Kidul, deswis Pakembangan yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (www.kuningankab.go.id/, 2021).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana penggambaran konstruksi komunikasi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan Jawa Barat dari metode studi literatur.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam pembangunan ialah adanya ketidakberdayaan atau lemahnya individu atau masyarakat sehingga memberikan dampak perekonomian yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup. Ketidakberdayaan bisa berupa semangat, keterampilan, sikap, tekun, jejaring kerja, pengetahuan, modal usaha. Oleh karena

itu pemberdayaan menjadi populer untuk membantu pembangunan. Pemberdayaan bisa berupa memberikan pengetahuan, keahlian dan kesempatan kepada individu atau masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Nindatu, 2019).

Perlu upaya yang serius, seksama mengenai pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan menuju masyarakat madani, masyarakat sebagai objek dan subjek dari pembangunan dan juga masyarakat sebagai pusat perhatian. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya juga didukung oleh proses komunikasi yang terjalin. Proses komunikasi berupa partisipasi masyarakat dianggap sesuai dengan proses pembangunan saat ini.

Dikutip dari (Indardi, 2016), pemberdayaan masyarakat merupakan kiat pembangunan dengan cara memberikan motivasi, mendorong, memberikan pemahaman pentingnya mengembangkan potensi diri yang dimiliki dan terus berupaya untuk mengembangkan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan bisa berupa memberikan pemahaman mengenai pentingnya menanamkan nilai tanggung jawab, terbuka, kerja keras, hemat, percaya diri, dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menggabungkan pemerataan untuk mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan untuk ke arah keberlanjutan. Untuk ini, penggabungan konsep pada komunikasi pemberdayaan masyarakat memiliki definisi menurut Ginanjar Kartasmita yakni kajian komunikasi pembangunan yang lebih fokus menekankan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat, dan dengan menggunakan sifat transaksional dan interkatif pada proses komunikasi yang dijalin. (Indardi, 2016).

Ditinjau pada aspek fungsi komunikasi pada komunikasi pembangunan menurut van de Fliert ialah: 1) kebijakan, berfungsi membuat kebijakan dan peraturan dan disosialisasikan agar masyarakat mengetahui; 2) pendidikan, berfungsi ketentuan ide, dan penggunaan teknologi dan membuat pengetahuan menjadi kekuatan; 3) masyarakat, berfungsi mendapatkan dukungan dari pihak luar dan juga memberikan pemahaman akan gagasan pembangunan; 4) advokasi, berfungsi adanya negosiasi dan mendorong adanya pemberdayaan; 5) organisasi, berfungsi melakukan monitoring evaluasi sebagai umpan balik dari proses pembangunan (Nindatu, 2019).

Ditinjau pada aspek fungsi proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat ialah: 1) adanya media untuk menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai kegiatan pemberdayaan; 2) adanya media untuk memberikan pemahaman mengenai budaya, karakteristik dan kebutuhan dari masyarakat; 3) adanya wadah partisipasi masyarakat; 4) adanya kesadaran dari masyarakat mengenai potensi diri yang dimiliki; 5) melakukan pemberdayaan secara aktif, partisipatif, dialogis, demokratis; 6) mempertahankan budaya lokal sebagai karakter jati diri bangsa (Nindatu, 2019).

Setelah memahami fungsi komunikasi pada pemberdayaan masyarakat, tentunya terapat tujuh model pemberdayaan masyarakat menurut Dhamotharan (2009) yakni; 1) mengembangkan hubungan; 2) menemukan kapasitas; 3) membangun cita - cita masyarakat; 4) arah tindakan masyarakat; 5) merancang tindakan masyarakat; 6) melaksanakan kegiatan; 7) mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari (Kartika et al., 2019).

Konsep Partisipasi Masyarakat

Pengertian konsep partisipasi masyarakat seperti yang digagas oleh Adi (2007) ialah

adanya ikut serta dari masyarakat mengenai identifikasi potensi dan identifikasi masalah yang ada dan juga terlibat dalam pemberian keputusan dalam menghasilkan solusi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, bentuk partisipasi dari masyarakat menjadi penting dikarenakan masyarakat yang memahami kondisi di lapangan, dan masyarakat menjadi pelaku utama sehingga masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera yaitu harus memiliki sikap dan juga mandiri (Setiawan, 2009: 39).

Selain memahami pengertian dari partisipasi masyarakat, terdapat tiga dimensi dalam partisipasi yakni; 1) *inclusivity*; 2) *intensity*; 3) *influence*. Selanjutnya dimensi partisipasi didukung oleh Ahmad dan Thalib (2011) yaitu; 1) *what activities*; 2) *who elites /ordinary people*; 3) *how the way/method of peoples' involvement*. Dimensi partisipasi berikutnya menurut Reason (1998) yakni; 1) *the political*; 2) *epistemological*; 3) *ecological*; 4) *spiritual*. Dan yang terakhir, menurut Wilson dan Wilde (2003), dimensi partisipasi yakni: 1) *influence*; 2) *inclusivity*; 3) *communication*; 4) *capacity* (Istanto et al., 2021).

Konsep partisipasi masyarakat merupakan bentuk pembagian kekuasaan antara pembuat kegiatan dengan penerima kegiatan sehingga mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Tentunya partisipasi masyarakat disesuaikan dengan tingkat yakni tingkat kewenangan dan tingkat tanggung jawab dalam memberikan atau mengambil keputusan. Berikut tujuh tingkat partisipasi menurut (Arnstein, 1969:217) yaitu: 1) *manipulation*; 2) *therapy*; 3) *information*; 4) *consultation*; 5) *placation*; 6) *partnership*; 7) *delegated power* (Purmada et al., 2016).

Konsep Pengelolaan Pariwisata

Konsep pada kelola pariwisata merujuk pada konsep dari Pitana dan Diarta (2009), yaitu adanya pengelolaan pada sumber daya wisata. Hal ini ditujukan untuk pencapaian yang berkelanjutan dan memiliki dampak positif bagi perekonomian, sosial, lingkungan dengan melakukan manajemen sumber daya. Manajemen ini dapat memberikan jaminan terhadap ekosistem, kualitas lingkungan yang baik. Selanjutnya, kelola pariwisata bisa menggunakan pendekatan pemasaran. Seperti yang diungkap oleh Inskeep (1991), rencana memasarkan pariwisata merupakan kegiatan yang memasarkan adanya produk pariwisata dan juga memasarkan pasar pariwisata. Adapaun elemen yang digunakan untuk memasarkan yakni; 1) diversifikasi pasar; 2) peningkatan mutu; dan 3) perpanjangan musim. Berdasar dari paparan mengenai konsep pengelolaan pariwisata seperti yang sudah dijelaskan mengenai pemasaran wisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pariwisata. Penggunaan manajemen sumber daya wisata dapat menjadikan masyarakat bergabung dan berpartisipasi aktif pada kegiatan pengelolaan pariwisata. (Purmada et al., 2016).

Konsep Desa Wisata

Konsep desa wisata menurut Nuryanti (1992) yaitu saling terintegrasi semua aspek misalnya atraksi, fasilitas pendukung dan akomodasi yang berkumpul dan memiliki tujuan menjadi desa yang dapat dikelola dan dipasarkan ke wisatawan. Adapun komponen dari desa wisata yaitu: 1) atraksi, adanya integrasi antara wisatawan dan dan kehidupan penduduk desa setempat, sebagai contoh wisatawan mencoba mengikuti kursus melukis dan membuat batik di desa wisata yang terkenal akan aktifitas melukis dan membuat batik; 2) akomodasi

yaitu tempat tinggal masyarakat di desa tersebut menjadi tempat akomodasi para wisatawan. Pearce (1995) mengutarakan bahwa konsep desa wisata bentuk usaha memenuhi, melengkapi seluruh aspek fasilitas dengan tujuan memajukan desa wisata dan memenuhi kebutuhan para wisatawan. Masyarakat tentunya memiliki peran dalam partisipasi aktif mengelola, mengembangkan desa wisata pengenalan suatu komunitas lokal di desa tersebut tentang tradisi dan budaya suatu desa. Adanya keberhasilan pengelolaan desa wisata membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa setempat yakni sebagai tuan rumah desa wisata dan juga mengelola yang dimulai dari tahap rencana, implementasi hingga evaluasi (Sidiq & Resnawaty, 2017).

Konsep desa wisata juga didukung menurut (Rahajaan et al., 2020), adanya sumber daya yang berkualitas, adanya peningkatan pemahaman dari masyarakat pentingnya desa wisata bagi kehidupan mereka kelak. UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan peraturan yang menentukan para pihak yang memiliki tanggung jawab pengembangan daya tarik pariwisata. Acuan pada pasal 23 ayat 1 sebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan perannya dalam mengembangkan daya tarik pariwisata. Tentunya pergeseran paradigma bahwa desa dari objek dan saat ini menjadi subjek merupakan proses pembangunan yang tidak mudah pada tahap proses implementasi. Banyak tugas dan pembenahan infrastruktur fisik atau non fisik untuk mendukung kepariwisataan (Endra Suseno, 2018).

Prinsip pada pengelolaan dan pengembangan suatu desa wisata menurut Sastrayuda, (2010) yaitu; 1) menggunakan sarana dan juga prasarana masyarakat; 2) memberikan keuntungan bagi masyarakat di desa wisata; 3) memberikan kemudahan untuk terjalinnya hubungan timbal balik yang baik dengan masyarakat; 4) adanya keterlibatan masyarakat; 5) penerapan pengembangan produk wisata. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam konsep deswis yaitu: 1) menemukan keunikan, sifat dan keaslian khusus dibanding desa lainnya; 2) menentukan letak strategis berupa sumber daya alam atau non alam yang tentunya berbeda dengan desa lainnya; 3) adanya kebudayaan di masyarakat sehingga dapat menarik calon wisatawan; 4) adanya peluang berkembang dari sarana dan prasarana yang ada di desa. Gagasan lain komponen desa wisata ditinjau dari Putra dalam Zakaria (2014), yaitu: 1) desa yang memiliki adanya potensi, budaya dan seni pada suatu desa; 2) adanya lokasi desa yang dipromosikan dan masuk ke dalam paket perjalanan wisata; 3) sebaiknya sudah memiliki sumber daya berupa pelatih, pelaku wisata seni, pelaku wisata budaya, pengelola desa; 4) tersedianya infrastruktur dan akses menuju desa wisata; 5) adanya jaminan keamanan, ketertiban, kebersihan untuk membuat wisatawan menjadi nyaman. Komponen pengelolaan deswis menurut Prasiasa (2011), ialah adanya partisipasi masyarakat di suatu desa, adanya sistem budaya, norma dan adat mengenai desa (Kartika et al., 2019).

METODE

Metode yang digunakan dalam membahas peran komunikasi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan Jawa Barat dengan menggunakan kajian literatur jurnal. Kajian literatur dikutip dari (Widiarsa, 2019) ialah kajian literatur memiliki tujuan memberikan informasi kepada pembaca berupa kajian hasil penelitian yang sudah ada dari peneliti lain yang disesuaikan dengan tema dan mengisi *novelty* atau kebaruan atau celah dalam penelitian yang tidak dikaji oleh peneliti lain.

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Kuningan merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi berupa lokasi geografis yang mendukung adanya desa wisata di kabupaten tersebut. Lokasi berupa pegunungan, beberapa air terjun dan potensi wisata non alam lainnya seperti wisata religi, wisata sejarah dan wisata situs purbakala turut menyumbang daya tarik calon wisatawan untuk berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 2017, sebanyak lebih dari dua juta wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara hadir dan mengunjungi Kabupaten Kuningan untuk mengisi libur akhir pekan bersama dengan keluarga (Kabupaten Kuningan, 2016).

Komunikasi pemberdayaan masyarakat di desa wisata yang dilakukan oleh Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh yang diimplementasikan di Kuningan Jawa Barat. Kabupaten Kuningan hingga 2021 ini sudah memiliki 6 desa wisata yang sudah maju yakni deswis Cibuntu, deswis Kampung Tumaritis, deswis Beunghar, deswis Cisantana, deswis Manis Kidul, deswis Pakembangan yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (www.kuningankab.go.id/, 2021).

DISKUSI

Pemberdayaan Masyarakat pada pengelolaan desa wisata

Setelah kita memahami pengertian dan juga konsep sesuai dengan tema, maka diperlukan studi literatur ataupun hasil jurnal yang berkaitan dengan komunikasi pemberdayaan masyarakat dan mengelola desa wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Hasil kajian ilmiah menurut (Kartika et al., 2019) membahas mengenai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada pengelolaan desa wisata disesuaikan dengan daerah dan kondisi desa dan juga ciri khas suatu desa. Hasil penelitian yang pertama yakni mengenai pengelolaan deswis Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengelolaan deswis Cibuntu belum maksimal dan belum adanya sinergi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa setempat. Partisipasi masyarakat terlihat pada inisiasi yang baik sehingga deswis Cibuntu menjadi salah satu deswis andalan dan deswis maju di wilayah Kabupaten Kuningan.



Gambar 2. Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat

Deswis Cibuntu jika dilihat pada pendekatan 7D, belum sepenuhnya bisa terimplementasi secara maksimal. Sudah terimplementasi dengan baik pada pola mengembangkan hubungan (*developing relation*) dan pola menemukan kapasitas (*discovering*

capacities). Pada pola membangun cita-cita masyarakat (*dreaming of community future*), arah tindakan masyarakat (*directions of community actions*), merancang tindakan (*designing community actions*), melaksanakan kegiatan (*delivering planned activities*) dan mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari (*documenting outputs, outcomes and learning*) masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan ada kendala. Selain itu, pemberdayaan masyarakat di deswis Cibuntu diperlukan dukungan dan dorongan dari pemerintah, dibutuhkan bantuan dari pihak luar desa, adanya sinergi dengan akademisi maupun praktisi dalam memberikan saran dan andil pada pengelolaan desa wisata Cibuntu, Kuningan.

Hal serupa juga terdapat kajian penelitian di Kabupaten Kuningan, lebih khusus pada desa wisata Linggarjati. Dalam hal ini melihat adanya keterlibatan masyarakat pada pengembangan deswis dan juga merumuskan pengembangan deswis dengan melihat partisipasi masyarakat lokal.



Gambar 3. Desa Wisata Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat

Pengembangan deswis belum melibatkan partisipasi masyarakat lokal, dan keterlibatan pemerintah menjadi dominan. Peran masyarakat masih berupa objek dari pembangunan bukan sebagai objek dari pembangunan sehingga menyebabkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas. Sebaiknya jika dilihat pada aspek tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan, pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pengelolaan. Masyarakat deswis sebaiknya diajak dialog dan diskusi untuk bisa menentukan model pembangunan deswis yang diinginkan, dikarenakan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut dan masyarakat perlu terlibat. Kedepannya diperlukan peranan dari pemerintah menjadi fasilitator, dan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat lokal untuk berperan dan berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata (Sidiq & Resnawaty, 2017).

Desa Cijemit, Kuningan, Jawa Barat menjadi salah satu desa yang memperdayakan masyarakat untuk mengelola desa wisata. Melalui karang taruna yang dikenal dengan karang taruna Medal Jaya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Desa wisata ini pernah mendapat juara I karang taruna se Indonesia karena kegiatan dan program yang dilakukan oleh karang taruna tersebut memberikan dampak positif. Masyarakat lokal di desa wisata Cijemit menanamkan hidup rukun, akur, kimpak dan saling bekerjasama dengan baik kepada semua pihak di dalam karang taruna Medal Jaya.



Gambar 4. Logo Desa Cijemit, Kuningan, Jawa Barat

Dalam pengelolaan desa wisata melalui karang taruna kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat pada bidang pendidikan, bidang pelayanan kesejahteraan sosial, bidang rekreatif, olahraga dan kesenian, bidang kerohanian, bidang pengembangan UKM dan juga pada bidang pemberdayaan perempuan. Dari rangkaian beberapa program karang taruna, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan inisiatif sendiri, tanpa paksaan. Adapun mewujudkannya masyarakat yang berdaya dikarenakan adanya modal sosial dan modal nilai yang ada di masyarakat, berupa kerjasama, tolong menolong, menghargai, dan adanya kebersamaan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh masyarakat lokal di desa tersebut diharapkan memiliki tujuan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat (Istiqomah, 2018).

Selain tiga desa wisata di atas, terdapat satu desa di Kuningan, Jawa Barat yang juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa Ciberung berupa adanya *One Village One Product* yang lebih khusus mempromosikan wajik sebagai makanan khas desa.



Gambar 5. Desa Ciberung dan Produk Wajik, Kuningan, Jawa Barat

Pemberdayaan masyarakat berawal dari dikumpulkannya pembuat wajik yang terdapat di desa, dikarenakan untuk penyamaan persepsi atau pemahaman mengenai cara mengolah, resep, proses pembuatan dan tempat wadah wajik, sehingga ini menimbulkan kesulitan adanya keseragaman dan kesulitan pengenalan ciri khas wajik desa Ciberung dibanding desa lainnya penghasil wajik serupa. Penyatuan perkumpulan wajik yang didominasi oleh ibu-ibu diberi nama Srikandi. Dengan program pemberdayaan di desa, menjadikan desa ciberung siap menerima perubahan, dan mengambil potensi peluang sebagai penghasil wajik yang bisa menghasilkan perekonomian desa dan masyarakat menjadi lebih baik (Nugroho, 2021).

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola desa wisata dengan adanya keterlibatan partisipasi aktif dari masyarakat pada proses pembangunan suatu desa menjadi penting untuk dipahami. Adanya rencana dari pemerintah Kabupaten Kuningan mengenai potensi desa wisata di Kuningan tentunya sudah baik dikarenakan pemerintah fokus pada

pembangunan, dan tentunya keterlibatan masyarakat menjadi berdaya dan aktif dalam berpartisipasi dalam mengelola desa wisata perlu didukung oleh semua unsur atau pihak di Kabupaten Kuningan. Memang pada beberapa desa wisata masih terlihat dominasi dari peran pemerintah kabupaten dan juga masih belum sepenuhnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan merencanakan potensi desa wisata yang dimiliki, menyiapkan program desa wisata, ikut terlibat dan implementasi pengelolaan desa wisata dan juga bisa mengukur evaluasi dari program yang sudah dijalankan. Kajian mengenai komunikasi pemberdayaan masyarakat pada desa wisata perlu diperhatikan, ditingkatkan dikarenakan kontribusi secara akademik sangat penting di bidang komunikasi pembangunan.

REFERENSI

- Digdowniseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan* (eko Sugiyanto (ed.); Juli). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Hakim, L. (2010). Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional. *Among Makarti*, 3(5), 70-78.
- Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*.
- Istanto, D., Apsari, N. C., & Gutama, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola Dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang Rw.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). *Share : Social Work Journal*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.34367>
- Istiqomah, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Karang Taruna Medal Jaya Di Desa Cijemit Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), 19-38. <https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3508>
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. In *CV Pustaka Setia*. CV Pustaka Setia.
- Kabupaten Kuningan. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan 2018-2023*. 4(1), 1-23.
- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 11-24. <https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16427>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 23-24.
- Khusniyah. (2020). Implementasi Model Pentahelix Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kediri (Studi Literatur). *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan*, 1-5. <https://conference.kahuripan.ac.id/index.php/SNapan/article/view/42>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3(2), 91-103.
- Nugroho, M. A. B. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program One Village One Product (Ovop) Dan One Village One Company Di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *E-Prosiding Seminar Nasional Hasil*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Semarang*, 427–430.
- Purmada, D. K., Wilopo, W., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- Rahajaan, J. D., Kurniadi, E., Yusuf, F., Darmawan, E., & Herawati, R. M. (2020). Perancangan Konsep Ideal Desa Wisata Di Desa Cibiruang Kabupaten Kuningan. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 89. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i02.3033>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Wardhana, & Aditya, H. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 1039–1051.
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- www.digitaldesa.id. (2020). *Apa Itu Desa Wisata?* <https://digitaldesa.id/artikel/apa-itu-desa-wisata#:~:text=Desa wisata adalah komunitas atau,dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda.>
- www.kuningankab.go.id/. (2021). *Daya Tarik Wisata Kabupaten Kuningan.* <https://www.kuningankab.go.id/wisata-dan-budaya/daya-tarik-wisata>